



---

## Komparasi Perbedaan Persepsi Antara Penyusun dan Pengguna Laporan Keuangan dalam Rangka Perubahan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua di Kota Sungai Penuh

Vivi Herlina

STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

viviherlina124@gmail.com

---

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the comparative Differences in Perception Between Compilers and Users of Financial Reports in the Region in the context of Changing the Accrual-Based Government Accounting System in Kota Sungai Penuh. This study uses a qualitative approach by conducting an interview process with informants to conduct the data analysis and triangulation process. The results of this study explain that there are differences in the perceptions of Compilers and Users regarding the implementation of Accrual-Based Accounting, compilers understand more in terms of compliance with the regulations. The implication of this study is that for the successful implementation of an accrual-based system, competent human resources are needed.*

**Keywords:** *Accrual, Difference in perception, Accounting system*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komparasi Perbedaan Persepsi Antara Penyusun dan Pengguna Laporan Keuangan di Daerah dalam rangka Perubahan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua di Kota Sungai Penuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan proses wawancara dengan informan untuk dilakukan proses analisa dan triangulasi data. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan persepsi Penyusun dan Pengguna mengenai penerapan Akuntansi Berbasis Akrua penyusun lebih memahami dari sisi ketaatan terhadap peraturannya. Implikasi penelitian ini, bahwa untuk keberhasilan penerapan sistem yang berbasis akrua maka diperlukan SDM yang kompeten.

**Kata Kunci:** Akrua, Perbedaan persepsi, Sistem akuntansi

### PENDAHULUAN

PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi sektor publik menjelaskan pergeseran akuntansi pemerintahan dari basis kas ke basis akrua. Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah telah memperbaiki persepsi antara penyusun dan pengguna laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Kota Sungai Penuh telah mempersiapkan diri untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Tidak adanya tenaga kerja akuntansi yang berpengalaman dan kredibel merupakan salah satu kendala yang menghalangi penerapan SAP berbasis akrua (Simanjuntak dalam Ardiansyah,2012). Faktor lain yang sangat penting adalah komitmen organisasi atau instansi. Pimpinan organisasi, yang menerima dana Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan, memiliki otoritas untuk membuat keputusan. Faktor terakhir adalah ketersediaan dukungan teknologi informasi, baik software maupun hardware, yang cukup untuk menjalankan SAP berbasis akrua. Selain itu, Aldiani

(2010) menyatakan bahwa ketersediaan perangkat pendukung, seperti komputer dan software, akan membantu SKPD menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan informasi dengan kualitas tinggi.

Dengan adanya perubahan pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah yang lebih dikenal sebagai sistem berbasis akrual dengan kebutuhan dalam penerapan SAP maka peneliti bermaksud untuk mengkaji dengan melakukan analisis Komparasi Perbedaan Persepsi Antara Penyusun dan Pengguna Laporan Keuangan di Daerah dalam Rangka Perubahan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Pemerintah Kota Sungai Penuh.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Persepsi**

Persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception* berasal dari bahasa Latin *perceptio*, dari *percipere* yang artinya menerima atau mengambil (Sobur, 2003: 445). Menurut istilah, para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda-beda. Menurut Robbins dan Judge dalam Wibowo (2013: 60), Persepsi dibentuk oleh tiga faktor, yaitu: (1) *perceiver*, orang yang memberikan persepsi, (2) *the object* atau *the target*, orang atau objek yang menjadi sasaran persepsi, dan (3) *the situation*, keadaan pada saat persepsi dilakukan. Faktor *perceiver* mengandung komponen *attitudes* (sikap), *motives* (motif), *interest* (minat atau kepentingan), *experience* (pengalaman), dan *expectations* (harapan). Faktor *target* mengandung komponen *novelty* (sesuatu yang baru), *motion* (gerakan), *sounds* (suara), *size* (ukuran), *background* (latar belakang), *proximity* (kedekatan), dan *similarity* (kesamaan). Sedangkan faktor *situasi* mengandung komponen *time* (waktu), *work setting* (pengaturan kerja), dan *social setting* (pengaturan sosial). Dari uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa proses persepsi terdiri dari proses fisik/seleksi, proses fisiologis, proses psikologis/interpretasi, dan diakhiri dengan reaksi/respon yang dapat bersifat positif maupun negatif.

### **Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan adalah suatu laporan yang berisikan informasi informasi seputar keuangan dari sebuah organisasi Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 1 Tahun 2015 Tentang Penyajian Laporan Keuangan "Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas". Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2015:2) Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan Keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, Laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan kas atau laporan arus dana).

Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya: (1) Relevan, (2) Andal; (3) Dapat dibandingkan; dan (4) Dapat dipahami.

Entitas Laporan Keuangan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri atas (1) Pemerintah Pusat (2) Pemerintah Daerah (3) Satuan Organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah (4) Organisasi lainnya, Jika

menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

### **Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua**

Akuntansi merupakan proses mengenali, mengukur dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Akuntansi bisa mempunyai tiga karakteristik penting yaitu : (1) Pengindentifikasian, pengukuran dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang (2) Entitas ekonomi kepada (3) Pemakai yang berkepentingan.

Basis Akrua berarti mengakui transaksi ketika transaksi yang bersangkutan secara ekonomi terjadi, tidak semata-mata ketika kas diterima atau dibayarkan.

Nurlan (2008 : 39) mendefinisikan basis akrua adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Basis akrua mampu menghasilkan informasi yang lebih lengkap dalam penyusunan laporan keuangan sehingga dapat memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat di penuhi oleh basis kas. Tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan.

Strategi pengembangan standar akuntansi pemerintah (SAP) dilakukan melalui proses transisi dari basis kas menuju akrua yang disebut cash to warl accrual. Dengan basis ini pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan asset, utang, dan ekuitas dicatat berdasarkan basis akrua. Dari pemaparan pengertian akuntansi basis akrua di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi basis akrua merupakan basis akuntansi di manahak dan kewajiban atas suatu transaksi atau peristiwa ekonomi lainnya diakuipada saat terjadinya peristiwa, tanpa melihat kas atau setara kas diterima ataudibayarkan. Selain itu, basis akrua mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas antara lain tujuan manajerial dan pengawasan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan pendekatan interpretif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode snowball sampling, dengan menyertakan informan kunci (Key Informan) yang ditetapkan oleh peneliti yaitu BKD (Badan Keuangan Daerah). Informan kunci adalah informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti sedangkan informan biasa adalah informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan mengetahui dan berhubungan dengan permasalahan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Persepsi Antara Penyusun dan Pengguna Laporan Keuangan di Daerah dalam rangka Perubahan system Akuntansi Sistem Akuntansi berbasis akrua, Penyusun memiliki persepsi tentang akrua basic semata-mata ditekankan pada dijalankannya aturan dan perundangan yang berlaku dalam struktur pemerintahan untuk pengelolaan laporan keuangan yang lebih professional. Selanjutnya Pengguna memiliki persepsi tentang pentingnya kualitas informasi laporan yang bisa dihasilkan dari penerapan basis akrua.

Hasil wawancara dengan informan mengenai apakah penerapan akuntansi berbasis sudah berjalan dengan baik, Informan Menjelaskan sebagai berikut:

" Untuk penerapan system akuntansi berbasis akrual sudah berjalan dengan baik, Hanya saja terdapat kendala pada sumber daya manusia yang kurang memahami tentang akuntansi berbasis akrual" (PPK-SKPD). Informasi dari informan lainnya:

"Untuk mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual sendiri sudah diusahakan dengan baik dalam penerapannya".

Ketika Peneliti mewawancarai informan mengenai apakah penerapan akuntansi berbasis akrual di Sekretariat DPRD sudah berjalan dengan baik, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

" Pada Kantor Sekretariat DPRD Penerapan akuntansi berbasis akrual Sudah berjalan dengan baik di lihat dari teknologi yang di pakai sudah memupuni " (Kassubag Program dan Keuangan Sekretariat DPRD).

"Sudah berjalan dengan baik penerapan akuntansi berbasis akrual yang diterapkan pada kantor secretariat DPRD" (Kassubag Fasilitas Penganggaran).

Ketika Peneliti mewawancarai informan mengenai apakah penerapan akuntansi berbasis akrual di Sekretariat Daerah sudah berjalan dengan baik, Informan menjelaskan sebagai berikut :

"Ya, Sudah berjalan dengan baik penerapan akuntansi berbasis akrual pada kantor sekda sendiri" (Hasil Wawancara dengan Bapak Ismanto).

"Sudah berjalan dengan baik akuntansi berbasis akrual pada secretariat daerah" (Hasil Wawancara dengan Ibu Reni).

Dari berbagai jawaban informan dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Kota Sungai Penuh sudah berjalan dengan baik sampai ke Laporan Keuangannya.

Dari sisi penyusun atau pengelola serta dari sisi pengguna didapatkan persepsi pemahaman yang berbeda, dikarenakan kepentingan yang berbeda pula. Dengan adanya akuntansi berbasis akrual mempermudah pelaporan keuangan, akuntansi berbasis akrual pendapatan dan pengeluaran dicatat segera setelah layanan atau produk digunakan, ketepatan waktu akuntansi berbasis akrual lebih akurat memberikan gambaran tentang laporan keuangan. Sementara itu dari sisi pengguna penerapan akrual basic dipersepsikan sebagai kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi dan kemudian dilaksanakan oleh para pengelola, karena harapan para pengguna adalah diperolehnya informasi keuangan yang memadai dan berkualitas dari penyelenggaraan akuntansi pemerintah berbasis akrual tersebut.

Dari Pendapat dari masing-masing SKPD dapat di tarik kesimpulan Bahwa sudut pandang dari pengelola dan penyusun, para pejabat daerah selaku pengguna anggaran dan para SKPD selaku pelaku anggaran pada setiap periode dituntut untuk menyajikan pelaporan keuangan secara akrual. Namun demikian persepsi mengenai penerapan akrual basic pada akuntansi pemerintahannya masih semata-mata dilaksanakan karena factor pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan bukan karena kebutuhan maupun kepentingan profesional.

## **SIMPULAN**

Dengan adanya penerapan akuntansi berbasis akrual dapat mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Bagi pengguna internal sistem akuntansi berbasis akrual berguna dalam proses pencatatan belanja yang bisa dicatat secara langsung. Bagi pengguna eksternal system akuntansi berbasis akrual akan mempermudah pelaporan keuangan,

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bungin, Burhan. 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman filosofis dan metodologis kearah penguasaan model aplikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Darise, N. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta ; PT. Indeks.
- Deloitte, 2004. *Mastering the transformation : New Public Management. Accrual Accounting, and Budgetin : Public Sector Paper*
- Dedi Nordiawan dkk, 2007. *Akuntansi Pemerintahan* , Jakarta : Salemba Empat.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. *Pernyataan Standar akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia.
- Simanjuntak, Binsar H. (2005. *Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. 1(1), 23-35.
- Sinaga. Hardian Hariono. 2010. *Analisis Pengaruh Total Arus Kas, Komponen Arus Kas, Laba Akuntansi Terhadap Return Saham*.